

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia merdeka dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 yang saat ini sudah berusia 72 tahun pada tahun 2017 ini. Sepanjang Negara Republik Indonesia merdeka telah terjadi pergantian kepala Negara. Pada masa orde baru pemilihan presiden tidak berdasarkan demokratis yang dalam artian tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut yang menyebabkan berakhirnya masa orde baru yang diiringi gerakan reformasi. Salah satu tuntutan gerakan reformasi tersebut adalah demokratis di dalam memilih pemimpin kepala Negara. Gaya kepemimpinan pada masa orde baru yang cenderung bersifat otoriter. Segala keputusan dan kuasa berada di tangan sebuah kepala Negara seutuhnya.

Tokoh-tokoh yang pernah menjadi kepala Negara Republik Indonesia adalah Soekarno (1946-1965), Soeharto (1965-1997), BJ. Habibie (1998-1999), KH. Abdurrahman Wahid (1999-2001), dan Megawati Soekarno Putri (2001-2004). Keseluruhan kepala Negara tersebut dipilih secara tidak langsung oleh rakyat. Beberapa kepala Negara yang terpilih secara tidak demokratis yang di dalam sebuah arti tidak dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki strategi system perekonomian yang berbeda-beda. Adapun system perekonomian yang dijalankan di Indonesia pada masa Presiden Soekarno yaitu system ekonomi sosialisme. Presiden Soeharto menjalankan sistem ekonomi di Indonesia yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Pada masa Presiden BJ Habibie menjalankan sistem

ekonomi di Indonesia yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Masa Presiden Gus Dur dan Megawati sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia adalah sistem ekonomi liberal.

Tahun 2004 merupakan kali pertama di dalam sejarah politik Indonesia presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Hasil pemilihan secara langsung oleh rakyat tersebut menghasilkan sebuah pemimpin Negara Indonesia yang baru yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK). Pemerintahan Susilo Bambang Yudhono dan Jusuf Kalla berlangsung sejak 2004 sampai 2009. Ini merupakan bukti bahwa karakteristik presidensialisme pada pemerintahan SBY-JK telah terpenuhi dalam pemilihan secara langsung oleh rakyat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai kepala Negara Republik Indonesia selama 2 periode. Pada periode kedua didampingi oleh Wakil Presiden Bapak Prof. Dr. H. Boediono pada tahun 2009 hingga 2014.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan baik. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang Tahun 2008 hingga 2009. Hal ini terbukti dari perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Pertahanan ancaman pengaruh krisis tersebut merupakan upaya yang sangat baik untuk kesejahteraan perekonomian rakyat Indonesia.

Program pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu merangkul rakyat Indonesia, pelaku usaha luar dan dalam negeri, dan lembaga-lembaga dunia

seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB untuk optimis bahwa kinerja ekonomi Indonesia untuk 5 tahun kedepan akan jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan otoriter. Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono dan lembaga-lembaga dunia tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 akan lebih tinggi berkisar di atas 6%. Target ini dilandasi oleh asumsi bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan terus membaik dan seperti tidak memperhitungkan faktor-faktor akan adanya gejolak-gejolak harga minyak di pasar dunia. Faktor tersebut termasuk pertumbuhan ekonomi dari motor-motor penggerak ekonomi dunia seperti AS, Jepang, EU (UNI EROPA), dan China akan meningkat.

Kenyataan yang terjadi pada pertengahan tahun 2005 ekonomi Indonesia diguncang oleh dua peristiwa tak terduga sama sekali, yakni naiknya harga BBM di pasar Internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dua hal ini membuat realisasi pertumbuhan PDB tahun 2005 lebih rendah dari target yang telah ditentukan. Hal ini merupakan tantangan terberat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dikarenakan jika tidak ditangani secara baik, pengaruh negatifnya akan sangat besar terhadap perekonomian nasional dan juga terhadap kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Kenaikan harga BBM ini menimbulkan tekanan yang sangat berat terhadap keuangan pemerintah (APBN). Akibatnya, pemerintah terpaksa mengeluarkan suatu kebijakan yang sangat tidak populis, yakni mengurangi subsidi BBM, yang membuat harga BBM di pasar dalam negeri meningkat tajam. Kenaikan harga BBM yang besar untuk industry terjadi sejak 1 Juli 2005. Harga Solar dari Rp

2.200 per liter menjadi Rp 4.750 per liter(naik 115 persen), Tanggal 1 Agustus 2005, kenaikan harga minyak tanah untuk industry dari Rp2.200 per liter menjadi Rp 5.490 per liter (naik 93 persen) dan Tanggal 1 Oktober 2005 pemerintah menaikkan lagi harga BBM yang berkisar 50 persen hingga 80 persen.

Diperkirakan hal ini akan berpengaruh terhadap ekonomi domestik. Terutama pada periode jangka pendek karena biaya produksi meningkat. Menjelang akhir masa Jabatan Susilo Bambang Yudhoyono yang pertama yang berakhir Tahun 2009, perekonomian Indonesia menghadapi dua eksternal, yakni kenaikan harga minyak mentah harga pangan di pasar global. Kenaikan harga minyak mentah yang terus menerus sejak tahun 2005 memaksa Pemerintah menaikkan lagi harga BBM terutama Premium, di dalam negeri pada tahun 2008.

Permasalahan kedua ialah kenaikan harga importir pangan, yang berarti harga pangan di dalam negeri juga ikut naik. Kedua guncangan eksternal tersebut waktu itu sangat mengancam kestabilan perekonomian nasional, khususnya tingkat inflasi. Secara kumulatif, inflasi periode Januari-Februari 2008 sudah mencapai 2,44 persen yang merupakan angka tertinggi sejak tahun 2003. Dengan inflasi *year on year* yang mencapai 7,4 persen maka ancaman inflasi. Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.

Tahun 2008-2009 pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terjadi krisis ekonomi global yang berawal dari krisis keuangan di Amerika Serikat dan merambat ke sejumlah Negara maju lainnya, seperti Jepang dan

Negara-negara Uni Eropa atau berada di zona Euro(EU), yang pada akhirnya mengakibatkan suatu resesi ekonomi dunia.Krisis global ini yang membuat permintaan bahan pokok dunia merosot juga berdampak pada perekonomian Indonesia terutama lewat penurunan ekspor dari sejumlah komoditi penting.Namun, dampaknya terhadap perekonomian nasional tidak lebih buruk pada saat krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998 yang membuat pertumbuhan ekonomi nasional negatif hingga mencapai sekitar 13 persen.

Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yaitu pertumbuhan rata-rata diatas 6,6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5,9%,di sisi lain harga barang dan jasa (inflasi) naik diatas 10,3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat.Tidak ada prestasi yang patut di iklankan oleh Demokrat di bidang ekonomi pada periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut dapat dilihat dari catatan koalisi, utang pemerintah sampai januari 2009 meningkat 31% dalam lima tahun terakhir.

Adapun posisi utang Januari 2009 sebesar Rp 1.667 Triliun atau naik Rp 392 Triliun.Kenaikan utang tersebut berdasarkan data Desember 2003 sebesar Rp 1.275 Triliun.

Pada periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono(2009-2014), Indonesia kembali menghadapi sebuah krisis ekonomi yang bersumber dari luar yakni krisis ekonomi di sejumlah negara Anggota masyarakat Eropa(EU), yang dikenal dengan sebutan Krisis Zona Euro. Krisis tersebut sekitar periode 2010-

2011 tidak terlalu berdampak langsung pada perekonomian Nasional karena EU bukan mitra dagang Indonesia terpenting, melainkan AS, Jepang, dan Republik Rakyat Cina(RRC). Memang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awalnya mengalami kegoyahan yang tidak terlalu besar dan dalam waktu tidak lama kurs Rupiah kembali menguat dan stabil.

Goncangan terakhir yang cukup serius dihadapi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 adalah depresiasi Rupiah yang mulai terjadi mulai bulan Agustus dan terus berlangsung secara bertahap dan hingga awal tahun 2014 posisi Rupiah tetap lemah di atas Rp12.000 per satu dolar AS. Hal tersebut membuat masyarakat umum maupun pembuat kebijakan ekonomi sangat khawatir melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang terus berlangsung. Suatu dampak yang terjadi apabila nilai tukar Rupiah semakin lemah akan berubah menjadi sebuah krisis Rupiah, seperti yang pernah dialami Indonesia pada masa krisis keuangan Asia 1997-1998.

Depresiasi Rupiah selalu merupakan sebuah masalah yang sangat serius karena Indonesia sangat tergantung pada impor untuk semua jenis barang (barang jadi, barang modal, barang pembantu dan bahan baku olahan). Kemudian pada bulan Agustus tahun 2013 BI (Bank Indonesia) menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 7 persen. Langkah ini untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dan memitigasi risiko kemungkinan pengaruh pelemahan Rupiah terhadap inflasi di dalam negeri. Dari sudut pandang masyarakat, memang di tataran makro Susilo Bambang Yudhoyono sendiri berhasil dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tetap positif dan berhasil memperkuat posisi

Indonesia di dalam pergaulan dunia(misalnya Indonesia menjadi anggota G20). Dalam G20 Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pertemuan Internasional di bidang perdagangan dan ekonomi seperti APEC yang diselenggarakan di Bali walaupun dilanda beberapa krisis ekonomi dari luar.

Pada masa akhir jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan catatan yang kurang positif di masa akhir jabatannya terutama di perekonomian seperti (1) ketergantungan Indonesia pada impor atas hampir semua barang-barang jadi maupun setengah jadi dan bahan baku (terutama yang sudah diproses siap pakai untuk kegiatan industri). Hal itu termasuk komoditas-komoditas pertanian, minyak mentah dan gas (migas) semakin tinggi yang membuat neraca perdagangan defisit atau cenderung semakin membesar, (2) walaupun tingkat kemiskinan menurun, kesenjangan antara kaum berada dan kaum miskin cenderung membesar, (3) Kehidupan sehari-hari masyarakat semakin mahal, terutama akibat pemotongan subsidi-subsidi khususnya pada BBM, (4) Infrastruktur cenderung semakin buruk, (5) Korupsi cenderung semakin merajalela.

Perekonomian Indonesia pada masa pemerintah Orde lama, Orde Baru, Reformasi, hingga pemerintahan Transisi mempunyai dampak yang negatif maupun yang positif. Jika kita melihat sejarah perekonomian Indonesia dari masa Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perekonomian mempunyai berbagai masalah yang sangat rumit . Seperti pada masa Orde lama sejak Tahun 1958 laju perekonomian menurun dan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) yang besar. Kemudian pada masa Soeharto yang terjadi

gejolak pada tahun 1998 akibat pembangunan infrastruktur yang tidak memadai dan korupsi di sekitar keluarga Soeharto sendiri. Kemudian pada masa pemerintah Presiden Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono stabilitas ekonomi apakah sudah stabil atau tidak.

Beberapa dampak perekonomian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di daerah kota Medan, terkhusus kecamatan Medan Tembung. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, banyak perubahan aspek ekonomi terjadi di kecamatan Medan Tembung pada masa SBY. Ada beberapa anggapan bahwa yang semakin kaya akan semakin kaya, yang miskin juga akan semakin miskin. Tingkat kestabilan perekonomian juga berdampak pada masyarakat Kecamatan Medan Tembung. Masih meningkat pengangguran di daerah kecamatan Tembung. Hal tersebut juga termasuk di dalam tingkat kestabilan perekonomian Negara.

Stabilitas ekonomi Indonesia dapat dilihat dari daerah sekitar masyarakat terutama daerah Kecamatan Medan Tembung masih banyak yang pengangguran. Diperkirakan Generasi '65 beranggapan bahwa pemerintahan Soeharto lebih baik dalam kebutuhan ekonomi. Namun apakah ekonomi pada pemerintahan Orde Baru benar-benar mencerminkan stabilitas ekonomi? Apakah pada masa pemerintahan transisi yakni dari era Gus Dur hingga Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjalankan stabilitas ekonomi Indonesia dengan baik, dan peneliti tertarik meneliti tentang Persepsi masyarakat pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono apakah di mata masyarakat beliau sukses

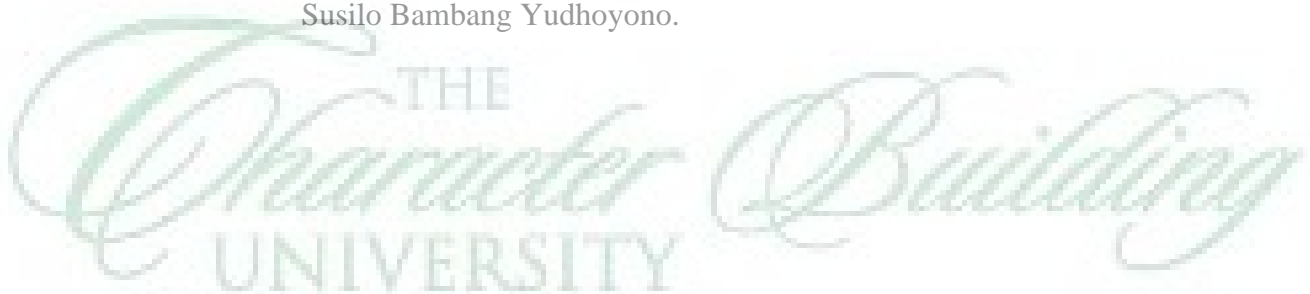
membangun perekonomian Indonesia selama 2 periode dia memimpin termasuk masyarakat kota Medan, Sumatera Utara.

Berdasarkan pemaparan di atas dan didasari pada kenyataan yang di tinjau bahwa terdapat perubahan aspek perekonomian masyarakat di Indonesia terutama masyarakat Kota Medan Kecamatan Medan tembung. Maka dengan pemaparan hal tersebut peneliti tertarik meneliti tentang ” Persepsi Masyarakat Kota Medan terhadap perekonomian Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang teridentifikasi adalah:

1. Program dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di bidang ekonomi
2. Keadaan Ekonomi pada Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
3. Persepsi masyarakat terhadap perekonomian masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.



C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bidang ekonomi dari tahun 2004-2014?
2. Bagaimana keadaan perekonomian Indonesia pada Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?
3. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Medan Tembung terhadap keadaan perekonomian di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program-program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bidang ekonomi.
2. Untuk mengetahui keadaan perekonomian Indonesia pada Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Medan Tembung tentang perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca untuk mengetahui bagaimana Persepsi masyarakat Terhadap Perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
2. Sebagai pelengkap referensi hasil penelitian dalam ruang lingkup sejarah Politik Indonesia.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi Mahasiswa Universitas Negeri Medan, khususnya Mahasiswa Pendidikan Sejarah agar dapat mengetahui Persepsi masyarakat terhadap perekonomian di Indonesia pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

THE
Character Building
UNIVERSITY